

KAJIAN IMPLIKASI TERBITNYA UU RI. NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

*(Study on the Implication of UU RI No 27 Tahun 2007 on Coastal
Region and Isles Management on Mangrove Forest Management)*

Oleh/By :

Aditya Irawan¹ & Nilam Sari²

ABSTRACT

Mangrove forest is coastal ecosystem as a shifting zone between upland ecosystem and coastal ecosystem. The authority for each management must be run by multi stakeholders/ multi institution. The purpose of this study is to review the UU No. 27 tahun 2007 deal with the management of coastal ecosystem and the small islands with the regulation coastal linkages with mangrove management. As the forestry department has an authority to manage the forest (UU No. 41 tahun 1999) deal with the forestry and national resources conservation and its ecosystem (UU No. 5 tahun 1990) deal with the authority of environmental and also the special authority from president by UU No. 26 tahun 2007 deal with space and land use, UU No. 5 tahun 1974 deal with local government, the authority management work gave a huge conflict in the implementation of the above regulation in order to solve the problem is urgent to relate the management policy for coordination.

Keywords: Regulation, management, mangrove forest

ABSTRAK

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan pendekatan multi sektoral/instansi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaannya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove.

Adanya kewenangan Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990), Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), Kewenangan setingkat Menteri yang ditunjuk sebagai koordinator / tata ruang oleh Presiden (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang), UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum (UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan) dan UU No.27/2007 PWP-3-K dalam pengelolaan hutan mangrove maka dirasakan semakin mendesak adanya kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan tersebut, karena sampai saat ini belum ada pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan pengelolaan Hutan Mangrove antar departemen maupun non departemen.

Kata kunci: UU No. 27 tahun 2007, wilayah pesisir, pengelolaan mangrove

¹ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda.

² Balai Penelitian Teknologi Perbenihan, Samboja, Kalimantan Timur.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan sudut pandang ekologis, wilayah pesisir dan laut yaitu Estuaria, Hutan Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, Pantai (berbatu, berpasir dan berlumpur) dan Pulau-Pulau Kecil merupakan lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait, dinamis dan produktif.

Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No.27/2007 PWP-3K) menyebutkan bahwa :

- Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan keterlibatan multi sektoral/instansi. Hal tersebut tergambar dari banyaknya pihak yang berkepentingan dengan wilayah pesisir terutama dalam hal pemanfaatan hutan mangrove sehingga memicu munculnya konflik yang tidak kunjung selesai. Sektor-sektor tersebut antara lain, yaitu sektor perikanan, perhubungan, industri dan perdagangan, pertambangan, kehutanan, permukiman dan pariwisata (Saparinto, 2007) yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kecenderungan banyaknya instansi yang berwenang dalam mengelola hutan mangrove menimbulkan masalah baru yaitu terjadinya "tumpangtindihnya kebijakan", mempertajam konflik sektoral dan saling lempar tanggung jawab.

Kondisi demikian telah tergambar dari semakin rusaknya hutan mangrove hampir di seluruh pesisir Indonesia. Sebagai contoh dalam kasus penanganan hutan mangrove di Delta Mahakam telah terjadi konversi hutan mangrove dari 0% menjadi 80% dari total luas hutan mangrove yang ada (Suripno *dkk*, 2004), menjadi kawasan pertambakan (budidaya udang) hanya dalam kurun waktu 15 tahun (1986 – 2001) bahkan ada kecenderungan pelaksanaan aturan untuk *green belt* tidak diindahkan (Irawan dan Sari 2004).

Banyak peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang telah diterbitkan yaitu : UU No. 5 tahun 1965 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan, UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 5 tahun 1979 Pemerintah Desa, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 9 tahun 1990 tentang Pariwisata, UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23 tahun 1997 tentang Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Otonomi Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rentang waktu (1965 – 1999) tersebut ada 6 instansi yang berwenang dalam pengelolaan hutan mangrove, yaitu Badan Pertanahan, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pariwisata.

Dalam implementasinya pengelolaan hutan mangrove pengelolaan berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan UU No. 5 tahun 1967; UU No. 5 tahun 1990 tentang; UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 19 tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985. Terbitnya UU No. 31 tahun 2004 dan UU No.27/2007 menambah daftar jumlah undang-undang yang memuat tentang pengelolaan hutan mangrove dan menambah daftar panjang instansi yang berwenang mengelola wilayah pesisir khususnya hutan mangrove

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove.

II. METODOLOGI

A. Bahan

Sebagai bahan analisa adalah salinan UU No. 5 tahun 1990, UU No. 26 tahun 2007, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun, dan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Analisis Data

Pendekatan analisa menitikberatkan pada analisa isi yaitu memadukan dan membandingkan isi pasal dan ayat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan definisi atau ketentuan umum, kewenangan pengelolaan, pemanfaatan, penyidikan dan ketentuan pidana khususnya dari UU No.41/1999 dan UU No.27/2007.

III. HASIL ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

A. Definisi Operasional

1. Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No.41 /1999 Pasal 1 ayat 2).

2. Mangrove

- a) Mangrove adalah tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas (Tomlinson, 1986 dan Wightman, 1989 *dalam* Noor dkk, 1999).
- b) Hutan Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur (Bengen, 2000)
- c) Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (*Avicennia* spp) dan bakau (*Rhizophora* spp). (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor: KEP.10/MEN/2002).
- d) Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, tetapi juga dapat tumbuh pada pantai karang, pada dataran koral mati yang diatasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur atau pantai berlumpur (Saparinto, 2007).

3. Pesisir

- a) Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan nir-hayati, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. No. KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu).
- b) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No.27/2007 pasal 1 ayat 2).
- c) Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (UU No.27/2007 pasal 1 ayat 7).

4. Pulau Kecil

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya (UU No.27/2007 pasal 1 ayat 3).

5. Pengelolaan

- a) Undang-Undang No. 5 tahun 1990
 - Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

- b) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 - Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 ayat 1).
- c) Undang-Undang No. 27/2007
 - Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antar pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 ayat 1)
 - Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5).

6. Sumber Daya

- a) Undang-Undang No. 5 tahun 1990
 - Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya ala hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (Pasal 1 ayat 1)
- b) Undang-Undang No. 41 tahun 1999
 - Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 ayat 13).
- c) Undang-Undang No. 27/2007
 - Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (Pasal 1 ayat 4).

B. Dasar Kewenangan Pengelolaan Mangrove

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990

- Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Pasal 3).

2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999

- Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan: a. perencanaan kehutanan, b. pengelolaan hutan, c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d. Pengawasan (Pasal 10 ayat 2).
- Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam Pengawasan (Pasal 21).

3. Undang-Undang No.27/2007

- Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai (Pasal 2).
- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan :
 - a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. Antar-Pemerintah Daerah
 - c. Antar sektor
 - d. Antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - e. Antara ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
 - f. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen
- Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K).
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K)
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). (Pasal 7 ayat 1)

C. Dasar Kewenangan Pemanfaatan Mangrove

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
 - b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 26).
- Pamanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan (Pasal 27).
- Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 28).

2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999

- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (Pasal 38 ayat 1).
- Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Pasal 38 ayat 2).
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (Pasal 38 ayat 3).

3. Undang-Undang No.27/2007

- Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu (Pasal 1 ayat 18).
- Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3 (Pasal 16 ayat 1).
- HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut (Pasal 16 ayat 2).
- HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu (Pasal 17 ayat 1).
- Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 17 ayat 2).
- HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat (Pasal 18).

D. Implikasi Terbitnya UU No.27/2007 terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove

1. Pengelolaan mangrove

Penjelasan atas UU No.27/2007 Pasal 2 menyatakan bahwa :

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasah pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 2 tersebut mengamanatkan bahwa kewenangan Departemen Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaannya mencakup ekosistem mangrove, hal tersebut diperkuat oleh definisi wilayah pesisir (UU No.27/2007 pasal 1 ayat 2) yang dinyatakan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan habitat hidup mangrove berada pada kawasan pesisir.

Apabila dipadukan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove maka Departemen Kehutanan memiliki kewenangan atas dasar pengelolaan hutan, hal tersebut tergambar dalam pasal Pasal 1 ayat 2 tentang definisi hutan, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 21, maka akan terlihat bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan (UU No.27/2007) berwenang mengelola hutan/ekosistem hutan mangrove berdasarkan kawasannya atau ekosistemnya (wilayah pesisir) sedangkan Departemen Kehutanan (UU No. 41/1999) memiliki wewenang pengelolaan terhadap hutannya. Walaupun pada Pasal 1 ayat 3 UU No. 41/1999 menyatakan bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Fakta ini menunjukkan adanya dua instansi yang berwenang dalam mengelola wilayah/ekosistem yang sama.

Sehubungan dengan kewenangan pengelolaan kawasan pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU No.27/2007, maka departemen ini berhak atas Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). (Pasal 7 ayat 1).

Adanya kewenangan Departemen Kehutanan dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5/1990), Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (UU No.23/1997 tentang), Kewenangan setingkat Menteri yang ditunjuk sebagai koordinator oleh Presiden (UU No. 26/2007), UU No. 5 tahun 1974, dan Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum (UU No. 11 tahun 1974) dalam pengelolaan hutan mangrove maka dirasakan semakin mendesak adanya kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan tersebut. Sampai saat ini belum ada pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan pengelolaan Hutan Mangrove antar departemen maupun non departemen.

2. Pemanfaatan hutan mangrove

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 38 ayat 1, 2 dan 3 memberikan kewenangan Departemen Kehutanan dalam pemanfaatan hutan (khususnya hutan mangrove) dan kewenangannya dalam pemberian izin lokasi pertambangan (UU No. 19/2004).

Adanya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir yang diamanatkan UU No.27/2007 pada Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) kepada Departemen Kelautan dan Perikanan maka departemen ini memiliki pula wewenang dalam pemanfaatan wilayah pesisir khususnya hutan mangrove. Implikasi dari kewenangan tersebut adalah kewenangan pemberian HP-3 (Pasal 1 ayat 18, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), dan Pasal 18 UU No.27/2007).

Walaupun cakupan zonasi HP-3 adalah Perairan Pesisir (definisi berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU No.27/2007) tetapi pola pasang surut sangat menentukan sejauh mana garis pantai (saat surut terendah) yang terbentuk menyinggung kawasan hutan mangrove dan sejauhmana sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi pengusaha atau sekelompok orang atau perseorangan dalam penggunaan izin HP-3 nya yang berdekatan dengan hutan mangrove.

Memahami kondisi aktual yang diamanatkan Undang-Undang tentang kewenangan pemanfaatan “hutan mangrove” (UU No. 41/1999 dan UU No.27/2007) serta belum optimalnya pelaksanaan Penataan Ruang (UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang) tentunya akan memunculkan tarik menarik kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan.

3. Kewenangan penyidikan

Kewenangan Penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup kehutanan (Departemen Kehutanan) diamanatkan dalam UU No. 41/1999 BAB XIII Penyidikan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3). Demikian pula sesuai dengan UU No.27/2007 BAB XV Penyidikan Pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Berdasarkan kewenangan tersebut jika ada pelanggaran larangan (UU No. 41/1999 Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan UU No.27/2007 Pasal 35 huruf e, f dan g) maka timbul pertanyaan siapa yang melaksanakan kewenangan penyidikan?. Kedua undang-undang tersebut tidak mengamanatkan adanya keterpaduan penyidikan antar pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang.

4. Ketentuan pidana

Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No. 41/1999 Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15) dengan ancaman pidana penjara paling lama berkisar antara 3 sampai dengan 10 tahun dan denda paling banyak berkisar antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No.27/2007 BAB XVII Pasal 73 ayat (1) huruf b, menyebutkan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja : (b) menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Ketentuan pidana yang tercantum di dalam kedua undang-undang tersebut berbeda, sehingga jika terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi pidana, harus ditentukan pidana mana yang digunakan. Sebagai contoh kasus di konversi hutan mangrove menjadi pertambakan yang bukan peruntukannya di Delta Mahakam, menurut UU No. 41/1999 Pasal 78 ayat (3) menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan UU No. 27/2007 BAB XVII Pasal 73 ayat (1) huruf b mengamanatkan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua ketentuan tersebut jika diaplikasikan dalam kasus yang sama akan diberi acaman pidana yang berbeda.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pengelolaan hutan mangrove untuk Departemen Kehutanan berdasarkan hutannya sedangkan Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada ekosistem mangrove sebagai bagian ekosistem pesisir.
2. Masih terjadi tumpangtindih kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hutan/ekosistem mangrove antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Departemen Kehutanan.
3. Terdapat potensi tarik menarik dalam hal kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di hutan/ekosistem mangrove.
4. Adanya dualisme dalam besaran sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di hutan/ekosistem mangrove.

B. Saran

1. Adanya dua instansi yang berwenang mengelola, memanfaatkan, melaksanakan penyidikan dan kewenangan pemberian sanksi, maka sangat mendesak untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan menunjuk pejabat setingkat menteri untuk mengkoordinasikan langkah pengelolaan dan pemanfaatan hutan/ekosistem mangrove.
2. Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil sebagai produk hukum dari turunan terbitnya UU No.27/2007 PWP-3K sebagai pengaturan pelaksanaan untuk menjembatani/membatasi kedua kewenangan ini.
3. Perlunya kajian yang lebih komprehensif tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang diatasnya terdapat hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Begen D.G. 2000. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Bogor. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.
- Irawan A, dan L.I. Sari. 2004. Potret degradasi lingkungan pesisir Kaltim, apa yang harus Kita Lakukan ?. Samarinda Pos. Senin, 8 November 2004.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. KEP. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- Noor Y.R, M. Khazali dan I.N.N. Suryadiputra. 1999. Panduan pengenalan mangrove di Indonesia. Ditjen PKA dan Wetlands Internasional Indonesia Program. Bogor.
- Suparinto C. 2007. Pendayagunaan Ekosistem Mangrove. Dahara Prize. Semarang.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1965 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1979 Pemerintah Desa.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Pariwisata.
- Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.